

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arba, & Mulada, D. A. (2020). Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2013). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2014). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). Hukum Jaminan Kebendaan: Hak Tanggungan, Fidusia, dan Hipotik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. Doktrin-Doktrin Modern dalam Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harsono, B. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2019). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Prenada Media.
- Hernoko, A. Y. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2020). Pengantar Ilmu Hukum: Hukum Jaminan dan Hak Tanggungan. Surabaya: Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2010). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2014). Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2019). Hukum Jaminan dan Hak Tanggungan dalam Perspektif Hukum Perdata. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, R. W. (2011). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.
- Purnamasari, I. S. (2011). Rambu-Rambu Hukum Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Bandung: Kaifa.
- Satrio, J. (2001). Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. K. O. (2015). Hukum Perikatan (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.

- Setiawan, R. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
- Siamat, D. Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan dan Moneter. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Subekti, R. (2005). Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2008). Asas-Asas Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2016). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2017). Hukum Perjanjian: Dasar-Dasar dan Aplikasi. Jakarta: PT Intermasa.
- Suhardono, A. (2021). Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sumardjono, M. S. W. (2021). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi dan Hukum Hak Tanggungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2017). Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2020). Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2017). Hukum Jaminan Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G. & Yani, A. Hukum Jaminan: Hak Tanggungan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Aldjufri, A. R., & Hazhin, U. M. (2024). Analisis keabsahan pembebanan hak tanggungan berupa harta waris tanpa persetujuan ahli waris. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities (IDJ)*, 5(1), 84–101.
- Ali Reza Aldjufri & Utiyafina Mardhati Hazhin. (2024). Analisis keabsahan pembebanan hak tanggungan berupa harta waris tanpa persetujuan ahli waris. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities (IDJ)*, 5(1), 84–101.
- Aprianto, H. (2023). Perlindungan hukum bagi ahli waris atas eksekusi aset oleh bank. *Jurnal Riviera Hukum dan Keadilan*, 5(2), 134–148.
- Arifin, M. (2020). Membangun konsep ideal penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82.
- Azzahra, F., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Keabsahan HGB sebagai objek hak tanggungan tanpa persetujuan pemegang hak pengelolaan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 500–511.
- Bachsin, A., Adiyaksa, A. F., Huga Ekoputro, H. F., Pratama Saputra, R., & Kusnadi, N. (2025). Peran asas pacta sunt servanda dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).
- Bela, A. N. (2022). Pelaksanaan lelang objek hak tanggungan dan perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak diberitahu. *Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 221–234.

- Cevitra, M. (2023). Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara dan perkembangannya. *Review UNNES Law Journal*, 8(1), 44–58.
- Dewi, A. (2022). Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh bank. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 201–218.
- Evie Hanavia, & Maulidiana, L. (2017). Perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik rumah bersama. *Jurnal Privat Law*, 5(1), 75–86.
- Fadli, M. (2018). Kajian doktrinal syarat dapat ditentukannya objek perikatan sebagai prasyarat mutlak lahirnya perikatan yang sah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 18–32.
- Fauzan, M., & Rahmawati, D. (2021). Tanggung jawab bank terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 55–72.
- Hirsanuddin, H. & Sudiarto, S. (2021). Perlindungan hukum bagi para pihak (kreditur dan debitur) melalui parate executie obyek hak tanggungan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1).
- Jalaludin, D. (2025). Integrasi kontrak elektronik (e-contract) dan arbitrase elektronik: implikasi terhadap asas kepribadian. *Jurnal FSH UINSA*.
- Martiana, A. A. (2024). Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian surogasi di Indonesia dari perspektif hukum perdata dan etika. *Perspektif Hukum*, 24(2), 295–316.
- N.K.E. Triani. (2021). Pewarisan hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan. *Jurnal Analogii Hukum*, 3(2), 101–112.

- Nafisah, S. (2020). Kedudukan hak tanggungan dalam perjanjian kredit perbankan: perspektif kepastian hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2), 98–113.
- Noho, M. D. H., Sari, E., Fitria, N., & Akbar, M. F. (2024). Pengaktualisasian itikad baik dalam mencapai hukum kontrak yang progresif di Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(2).
- Nuraini, F. (2022). Analisis yuridis pelaksanaan lelang agunan kredit oleh bank berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*.
- Nurwullan, Siti; Siregar, Hendrik Fasco. (2022). Aspek normatif asas konsensualisme dalam penambahan klausula kontrak tanpa persetujuan para pihak. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Prima, M. K., & Sulistyaningrum, H. P. (2025). Asas itikad baik dalam Memorandum of Understanding: tinjauan terhadap hukum perjanjian di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2(1), 85–96.
- Ramadhan, F. (2015). Analisis yuridis kriteria objek perjanjian berdasarkan syarat 'suatu hal tertentu' dalam Pasal 1320 KUHPerdata. *Jurnal Hukum Novelty*, 6(2), 145–158.
- Rodliyah. (2023). Sahnya suatu perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Rusli, T. (2015). Asas kebebasan berkontrak sebagai dasar perkembangan perjanjian di Indonesia. *Pranata Hukum*, 10(1).

- Salsabila, J., Indraswary, A. D., Putri, E. E., Pujawati, S. A., & Seifana, N. (2024). Penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian kontrak berbasis smart contract. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 51–56.
- Salsabila, J., Indraswary, A. D., Putri, E. E., Pujawati, S. A., & Seifana, N. (2024). Penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian kontrak berbasis smart contract. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 51–56.
- Sastrawan, I. G. (2018). Batasan hukum tindakan paksaan (dwang) psikologis dalam penandatanganan akta perjanjian kredit. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 175–188.
- Simanjuntak, J. (2020). Prinsip keadilan dalam eksekusi hak tanggungan oleh kreditor. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Sinaga, M. (2020). Pelaksanaan lelang terhadap jaminan hak tanggungan pada perbankan (studi di KPKNL). *Jurnal Iuris*.
- Sinaga, Niru Anita. (2022). Keselarasan asas-asas hukum perjanjian untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam suatu perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1).
- Susanti, N. (2024). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. *Indragiri Law Review*, 2(2), 33–39.
- Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 841–848.
- Tandian, J. (2024). Analisis yuridis ahli waris yang wanprestasi atas perjanjian kredit.

Triani, N. K. E. (2021). Pewarisan hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan.

Jurnal Analogii Hukum, 3(2), 101–112.

Wibowo, A. (2019). Perlindungan hukum ahli waris dalam kasus kesalahan bank.

Jurnal Dinamika Hukum, 19(3), 456–478.

Widodo, R. G. (2024). Penerapan asas konsensualisme dan penyelesaian masalah dalam perjanjian jual beli online. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 183–189.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 32/PDT/2021/PT TJK.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/K/Pdt/2021.

